

**PERENCANAAN KOMUNIKASI BANK INDONESIA DALAM
MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM
ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD) DI
PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas

Oleh :

Fitri Dwiyanti

2110862025

Nama Pembimbing :

Dr.Ernita Arif, M.Si

Dr. Rahmi Surya Dewi, M.Si



DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

ABSTRAK

PERECANAAN KOMUNIKASI BANK INDONESIA DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD) DI PROVINSI JAMBI

Oleh:

Fitri Dwiyanti

2110862025

Pembimbing:

Dr.Ernita Arif, S.P, M.Si

Dr. Rahmi Surya Dewi, S.Ag, M.Si

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) merupakan program yang mengupayakan transformasi digital transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien dan handal. Dalam menjalankan tugasnya sebagai koordinator dan fasilitator, Bank Indonesia Jambi memerlukan perencanaan komunikasi agar proses implementasi kebijakan berlangsung optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan komunikasi Bank Indonesia dan mengetahui proses implementasi kebijakan dalam perluasan sistem pembayaran non tunai melalui program ETPD di Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi partisipan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan komunikasi Bank Indonesia sudah terorganisir dengan baik. Bank Indonesia telah melewati tahapan proses analisis dan riset terkait digitalisasi daerah, strategi merancang kegiatan komunikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan Provinsi Jambi, implementasi strategi hingga evaluasi pelaksanaan komunikasi. Namun pada proses implementasi kebijakan yang melibatkan lembaga TP2DD Jambi secara keseluruhan, terdapat beberapa aspek yang perlu dioptimalkan seperti kesiapan sumber daya dan regulasi. Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan anggaran program ETPD secara khusus dan melakukan pemerataan infrastruktur jaringan di seluruh daerah. Selain itu, regulasi kanal pembayaran khususnya *e-Commerce* dan mesin EDC perlu diluncurkan segera sehingga kanal pembayaran tersedia secara beragam dan diharapkan dapat meningkatkan realisasi indeks ETPD.

Kata kunci: Perencanaan Komunikasi, Bank Indonesia, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, Implementasi Kebijakan

ABSTRACT

COMMUNICATION PLANNING OF BANK INDONESIA IN SUPPORTING THE IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL GOVERNMENT TRANSACTION ELECTRONIFICATION POLICY IN JAMBI PROVINCE

By:

Fitri Dwiyanti

2110862025

Supervisor:

Dr.Ernita Arif, S.P, M.Si

Dr. Rahmi Surya Dewi, S.Ag, M.Si

The Regional Government Transaction Electronification program seeks to digitally transform revenue and expenditure transactions of regional governments to establish a secure, efficient, and reliable payment system. In its role as coordinator and facilitator, Bank Indonesia's Jambi office requires a robust communication plan to ensure optimal policy implementation. This study aims to analyze Bank Indonesia's communication planning and to examine the policy implementation process in expanding non-cash payment systems through the ETPD program in Jambi Province. Employing a qualitative case study approach, data were collected via in-depth interviews, participant observation, and document review. Findings indicate that Bank Indonesia's communication planning is well-organized, having completed the stages of regional digitalization analysis and research; the design of communication activities tailored to Jambi's needs; strategy implementation; and performance evaluation. However, in the policy implementation phase involving the entire Jambi TP2DD network, certain elements require optimization—particularly resource readiness and regulatory frameworks. The regional government must allocate a dedicated ETPD budget and ensure equitable network infrastructure across all areas. Additionally, regulations for payment channels—especially e-commerce platforms and EDC machines—should be enacted promptly so that a diverse range of payment channels becomes available, thereby enhancing the currently low ETPD realization index.

Keywords: *Communication Planning, Central Bank of Indonesia, Regional Government Transaction Electronification, Policy Implementation*